

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, pada akhirnya Perubahan Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024 dapat disajikan untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Perubahan Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024 ini pada hakikatnya merupakan perencanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Untuk meningkatkan daya guna laporan dan peningkatan kinerja, Inspektorat Kota Jambi secara bertahap berupaya untuk mengembangkan kualitas implementasi pelaporan kinerja dengan memperhatikan kriteria komponen-komponen perencanaan, memanfaatkan sistem pengukuran kinerja untuk monitoring kegiatan dan meningkatkan mutu informasi dalam laporan kinerja.

Dengan telah disusunnya Perubahan Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024 ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait, khususnya Inspektorat Kota Jambi sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kerjanya.

Jambi, Juli 2024

INSPEKTUR,



DESYANTY, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19791208 199810 2 001

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KASUBBAG PERENCANAAN	SEKRETARIS
Tgl. 	Tgl. 
LUCKY EKASARI, S.STP, M.Si NIP. 19970331 201206 2 001	Hj. TIN SUNARTI SE NIP. 19680622 199401 2 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, pada akhirnya Perubahan Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024 dapat disajikan untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Perubahan Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024 ini pada hakikatnya merupakan perencanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Untuk meningkatkan daya guna laporan dan peningkatan kinerja, Inspektorat Kota Jambi secara bertahap berupaya untuk mengembangkan kualitas implementasi pelaporan kinerja dengan memperhatikan kriteria komponen-komponen perencanaan, memanfaatkan sistem pengukuran kinerja untuk monitoring kegiatan dan meningkatkan mutu informasi dalam laporan kinerja.

Dengan telah disusunnya Perubahan Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024 ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait, khususnya Inspektorat Kota Jambi sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerjanya.

Jambi, Juli 2024

INSPEKTUR,



DESYANTY, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19791208 199810 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	14
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	16
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	20
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	 21
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	21
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	23
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	 25
 BAB V PENUTUP	 30

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024	7
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Jambi.....	14
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024.....	18
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Jambi.....	23
Tabel 3.2	Tujuan Inspektorat Kota Jambi.....	23
Tabel 3.3	Sasaran Inspektorat Kota Jambi	24
Tabel 3.4	Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Jambi	24
Tabel 4.1	Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.....	26
Tabel 4.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	27

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah dengan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan. Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan Penyusunan Renja
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja
3. Penyusunan Rancangan Renja
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja
6. Penetapan Renja

Rancangan Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, mengacu pada Renstra Perangkat Daerah, mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dalam Forum Perangkat Daerah yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Inspektorat Kota Jambi mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Inspektorat Kota Jambi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi, sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi, dimana Rencana Strategis Inspektorat Kota Jambi dalam bidang pengawasan menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Dokumen Rencana Kerja Inspektorat Kota Jambi pada dasarnya merupakan hasil proses pemikiran yang strategis untuk menyikapi isu yang makin berkembang di masyarakat tentang perlunya pengawasan yang menyeluruh untuk lebih menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dengan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Inspektorat Kota Jambi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Inspektorat Kota Jambi, Inspektorat berkedudukan sebagai pelaksana urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Walikota dan/ atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;

- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Jambi merupakan penjabaran dari Perubahan RKPD Kota Jambi yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Jambi.

Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Kota Jambi mengusulkan perubahan anggaran pada APBD Kota Jambi di Tahun 2024 untuk Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan sebesar Rp. 15.203.729.000,00 yang terdiri atas 3 (tiga) Program, 11 (sebelas) Kegiatan, dan 33 Sub Kegiatan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024 berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005 – 2025;
10. Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026;
11. Peraturan Walikota Jambi Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Inspektorat Kota Jambi;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan serta indikator kinerja pada Inspektorat Kota Jambi sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawasan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Jambi yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kinerja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024 ini adalah :

1. Sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Inspektorat Kota Jambi selama Tahun 2024;
2. Merumuskan rancangan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pendanaanya untuk Tahun 2024 ;
3. Sebagai acuan resmi untuk pengukuran kinerja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyajian Perubahan Renja Perangkat Daerah sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB



HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Inspektorat Kota Jambi pada Tahun 2024 telah melaksanakan 3 program, 11 kegiatan dan 33 sub kegiatan dengan anggaran Rp 16.985.629.000,00 (enam belas milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Berikut realisasi anggaran sampai dengan triwulan II tahun 2024.

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN TAHUN 2024 Rp	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN Rp
				KEUANGAN		
				Rp	%	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		13.122.895.280	4.492.484.585	34,23	8.630.410.695
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.492.500	-	0,00	7.492.500
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.495.500	0,00	0,00	4.495.500
	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.997.000	0,00	0,00	2.997.000
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.816.303.468	3.404.660.255	43,56	4.411.643.213
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.648.963.468	3.377.935.255,00	44,16	4.271.028.213
	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	167.340.000	26.725.000,00	15,97	140.615.000
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.400.000	6.000.000	41,67	8.400.000
	1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.400.000	6.000.000,00	41,67	8.400.000
	4	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	934.974.250	149.237.571	15,96	785.736.679
	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	103.063.500	85.386.000,00	82,85	17.677.500
	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	586.000.000	63.851.571	10,90	522.148.429
	3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	245.910.750	0,00	0,00	245.910.750
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.487.662.167	229.992.655	15,46	1.257.669.512
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.197.442	1.460.000,00	6,58	20.737.442
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	182.108.842	60.659.300,00	33,31	121.449.542
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.380.013	6.977.200,00	40,14	10.402.813
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	81.437.370	15.094.000,00	18,53	66.343.370
	5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	146.242.500	11.807.750,00	8,07	134.434.750
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.038.296.000	133.994.405,00	12,91	904.301.595
	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.043.383.695	429.900.000	41,20	613.483.695
	1	Pengadaan Mebel	192.718.200	0,00	0,00	192.718.200
	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	850.665.495	429.900.000,00	50,54	420.765.495
	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	604.961.200	157.537.597	26,04	447.423.603
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.900.000	3.000.000,00	43,48	3.900.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			ANGGARAN TAHUN 2024 Rp	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN Rp
					KEUANGAN		
					Rp	%	
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	152.200.000	57.810.097,00	37,98	94.389.903
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	445.861.200	96.727.500,00	21,69	349.133.700
	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.213.718.000	115.156.507	9,49	1.098.561.493
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	714.118.000	106.836.507,00	14,96	607.281.493
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.750.000	8.320.000,00	13,47	53.430.000
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	437.850.000	0,00	0,00	437.850.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			3.252.733.720	151.875.000	4,67	3.100.858.720
	1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		2.902.733.720	143.800.000	4,95	2.758.933.720
		1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.009.000.000	22.550.000,00	2,23	986.450.000
		2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	739.000.000	10.750.000,00	1,45	728.250.000
		3	Reviu Laporan Kinerja	130.000.000	0,00	0,00	130.000.000
		4	Reviu Laporan Keuangan	350.000.000	82.625.000,00	23,61	267.375.000
		5	Kerjasama Pengawasan Internal	212.733.720	0,00	0,00	212.733.720
		6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	462.000.000	27.875.000	6,03	434.125.000
	2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		350.000.000	8.075.000	2,31	341.925.000
		1	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	350.000.000	8.075.000,00	2,31	341.925.000
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			610.000.000	-	0,00	610.000.000
	1	Pendampingan dan Asistensi		610.000.000	-	0,00	610.000.000
		1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	50.000.000	0,00	0,00	50.000.000
		2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	250.000.000	0,00	0,00	250.000.000
		3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	250.000.000	0,00	0,00	250.000.000
		4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	60.000.000	0,00	0,00	60.000.000
J U M L A H				16.985.629.000	4.644.359.585	27,34	12.341.269.415

Hingga triwulan II tahun 2024, tingkat realisasi keuangan sebesar 27,34%. Berikut adalah tabel hasil evaluasi rencana kerja sampai dengan triwulan II tahun 2024.

Tabel 2.2
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah
Renja Inspektori Kota Jambi
Periode Pelaksanaan : Trwulan II Tahun 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RPJMD :									
Sasaran RPJMD		Indikator		Target Kinerja					
Meningkatkan Profesionalisme ASN dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Berbasis TIK		Nilai SAKIP		BB					
		Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (EPK)		2,972					
No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah yang diserahkan (Jumlah dan % dari II tahun 2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun 2024	Unit (Bidang) Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				K	Rp	K	Rp	K	
				LEVEL 3	-3,45	LEVEL 3	-3,45	LEVEL 3	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Level Kapabilitas App - Nilai Area Sistem Manajemen SDM dan Pengujian Akuntabilitas (Hasil Penilaian Inspektorat)	14.542.632.823 -3,45	11.223.206.900 -3,45	13.122.893.280 -3,45	13.172.287.756	15.783.808.202	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD (Hasil Penilaian Inspektorat)	Nilai SAKIP PD	84,50	7.482.500	7.482.500	0	2.487.500	
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	4.495.500	2 Dokumen	2	0	1.248.750	
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	2.997.000	2 Laporan	2.997.000	0	1.248.750	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100%	8.944.394.877	BB	7.818.303.468	2.280.892.229	12.342.451.202	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 orang/bulan	8.768.824.877	65 orang/bulan	7.648.963.468	55 orang/bulan	12.146.670.202	
b	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengukuran/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengukuran/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	175.560.000	12 Dokumen	167.340.000	3 Dokumen	195.781.000	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyempurnaan Hasil Pengukuran/Verifikasi Barang Milik Daerah	100%	14.480.000	BB	14.400.000	3.800.000	104.060.000	
a	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	14.400.000	12 Laporan	14.400.000	3 Laporan	104.060.000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	72,11	906.833.250	BB	934.974.250	137.887.571	438.590.071	
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Alat/Beserta Alatnya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Alat/Beserta Alatnya	163 Pakaian	135.687.500	0	103.083.000	122 Pakaian	65.386.000	
b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	64 Orang	640.200.000	64 orang	568.000.000	55 Orang	266.561.571	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (Output/Sub Kegiatan)	Target Renstra Peringkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Peringkat Daerah (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renstra Peringkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Trivulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Peringkat Daerah Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Peringkat Daerah PD sid Tahun 2024	Unit (Bidang) PD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 6 x 12	14 = 12/5 x 100%	15							
e		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	64 orang	211.835.750	54 orang	56.632.500	64 orang	245.810.750	0	0	0	0	0	56.632.500	26,72%	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan				
d		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0		Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan				
s		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sosial RKBU	70%	1.228.650.968	BB	647.161.981	70%	1.487.662.187	119.621.573	178.184.799				644.988.353	76,91%					
a		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 paket	20.828.520	4 paket	15.050.133	9 paket	22.197.442	1 Paket	1.460.000	3 Paket	1.460.000	2 Paket	2.920.000	2 Paket	17.970.133	86,28%	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan		
b		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	181.512.225	4 paket	77.610.785	3 paket	182.108.842	1 Paket	30.602.500	3 Paket	45.265.300	2 paket	75.867.800	2 paket	153.478.585	84,56%	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan		
c		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	44.128.353	4 paket	15.262.493	3 paket	17.380.013	1 Paket	5.833.500	3 Paket	3.747.200	2 Paket	9.580.700	2 Paket	24.633.193	56,27%	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan		
d		Penyediaan Barang Cetak dan Pengondisian	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengondisian yang Disediakan	2 paket	81.437.370	4 paket	77.997.480	2 paket	81.437.370	1 Paket	3.439.000	1 Paket	15.084.000	2 Paket	18.533.000	2 Paket	98.530.480	118,53%	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan		
e		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Realisasi Kunjungan Tamu	12 laporan	184.815.000	12 laporan	101.491.740	12 laporan	146.242.500	3 Laporan	7.395.000	3 Laporan	4.412.750	6 Laporan	11.807.750	6 Laporan	113.259.480	61,30%	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan		
f		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	715.929.500	12 Laporan	359.759.350	12 laporan	1.038.298.000	3 Laporan	70.891.573,00	3 Laporan	108.205.549	6 Laporan	179.097.122	6 Laporan	538.856.472	75,27%	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan		
g		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sosial RKBU	70%	2.154.774.830	BB	984.878.872	70%	1.043.383.695	0	0	0	0	0	428.900.000	1.014.778.572	47,09%				
h		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	-	-	1 unit	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000.000		Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan				
a		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	154 unit	284.535.200	10 unit	15.136.364	154 unit	192.718.200	0	0	0	0	0	0	15.136.364	5,72%	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan			
b		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	107 Unit	1.890.238.730	15 unit	169.742.208	107 Unit	850.665.495	0	21 Unit	428.900.000	428.900.000	21 Unit	428.900.000	589.642.208	31,72%	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan			
c		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	613.396.400	BB	341.448.460	100%	604.891.200	78.069.947	78.447.850				157.537.597	488.885.907	81,08%				
7																					

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2024	Unit (Bidang) PD Penanggung Jawab				
				Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang direalisasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)							
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K				Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 6 x 12	14 = 13 x 100%	15						
a		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 Laporan	6.900.000	12 laporan	400 Laporan	4.900.000				1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	7.900.000	114,49%	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan			
b		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	158.200.000	12 laporan	36 laporan	128.200.000	8 Laporan	26.421.150		9 Laporan	57.810.097	9 Laporan	186.010.097	117,56%	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan			
c		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 laporan	450.298.400	12 laporan	60 laporan	208.348.400	12 Laporan	53.028.500		12 Laporan	96.727.500	12 Laporan	305.075.900	67,15%	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan			
d		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemeliharaan BMD Dalam Kondisi Baik	Persentase Penugasan BMD Dalam Kondisi Baik	5%	580.620.000	888	5%	322.330.000		62.865.507			115.156.467		437.468.507	75,35%				
e		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baya dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Perawatannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipekerti dan Perawatannya	29 unit	337.050.000	28 unit	29 Unit	263.880.000	29 Unit	61.245.507		15 Unit	108.635.507	15 Unit	380.716.507	115,92%	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan			
f		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipekerti	63 unit	45.350.000	66 unit	63 unit	38.450.000	4	1.620.000		4	8.320.000	4	46.770.000	103,13%	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan			
g		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipekerti	1 unit	198.220.000		1 unit	437.850.000		0			0		0	0,00%	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan			
h		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipekerti	-	-		-	-	0	0			0		0		Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan			
i		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Komponen Evaluasi Internal)	6,89	3.459.890.100	64,5%	6,89	1.449.240.100		151.875.000			151.875.000		1.601.115.100	46,28%				
j		Penyenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penurunan Temuan Pelanggaran Etik dan Disiplin Kerja Pemerintah Daerah	20%	3.159.890.100		20%	1.102.490.100		143.800.000			143.800.000		1.248.260.100	39,44%				
k		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	19 laporan	350.000.000	12 laporan	19 laporan	323.700.000		22.550.000			22.550.000		346.250.000	98,93%	Itinan			
l		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	199 laporan	2.000.000.000	154 laporan	199 laporan	323.700.000		10.750.000			10.750.000		334.450.000	16,72%	Itinan			
m		Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Revisi Laporan Kinerja	40 laporan	150.000.000	40 laporan	40 laporan	40.500.000		0			0		40.500.000	27,00%	Itinan			
n		Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Revisi Laporan Keuangan	40 laporan	150.000.000	40 laporan	40 laporan	40.500.000		82.625.000			82.625.000		123.125.000	82,06%	Itinan			

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi Triwulan I, II dan IV Tahun 2024)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD sid Tahun 2024		Unit (Bidang) PD Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 6 + 12	14 = 13 x 100%	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
I	1	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kelembagaan Pengawasan Internal yang Terbentuk	48	200.000.000	48	200.000.000	1	108.190.100	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	207.900.000	48	

Faktor pendukung keberhasilan kinerja, komitmen dan kemauan pimpinan dan para pegawai
 Faktor penghambat pencapaian kinerja, kualitas dan kuantitas SDM
 Tidak lanjut yang diberikan dalam triwulan berikutnya? lebih memperhatikan sumber daya yang ada
 Tidak lanjut yang diberikan dalam Renc. Perangkat Daerah ke depan? belum ada

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Jambi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Penyajian tabel Hasil Analisis pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kota Jambi dapat disajikan dalam tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2 (Tabel T-C 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Jambi

No	Indikator	Target Renstra PD (Setelah Perubahan)					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
		2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2023	
1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan	75%	80%	90%	100%	100%	89,53%	90,24%	95%	97%		
2	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Internal)	5,6	6	6,2	6,4	6,89	5,76	5,91	n/a	6,8		Berdasarkan Permenpan-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaian pada Evaluasi AKIP Tahun 2022.
3	Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	3	3,25	3,5	3	3	3	2.893	3,173	3		
4	Jumlah Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai WBK	0	1	2	0	0	0	0	0	0		Mulai tahun 2022 sudah tidak menjadi indikator pencapaian kinerja
5	Level Kapabilitas APIP	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III		

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan gambaran umum objek pemeriksaan terkait dengan pelayanan PD telah dilakukan analisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi Inspektorat Kota Jambi berkenaan dengan urusan mengenai :

1. Inspektorat Kota Jambi telah bekerjasama secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan kepada PD melalui rekomendasi dan catatan untuk ditindak lanjuti sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan kepada Kepala PD, namun hal terkait dengan pemberian pelayanan kepada Kepala PD masih rendah karena kurangnya komitmen dari masing-masing Kepala PD dalam memanfaatkan hasil pemeriksaan dan menindaklanjutinya.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi :
 - a. Sampai dengan saat ini aparatur pengawas belum memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Dengan berbagai macam tugas dan fungsi pengawasan yang semakin berat dan kompleks maka diperlukan aparat pengawas yang memadai dan mempunyai kompetensi yang tinggi. Dengan terpenuhinya kualitas sumber daya manusia aparat pengawas fungsional yang kompeten maka akan mampu melaksanakan tugas-tugas pembinaan serta pengawasan secara profesional.
 - b. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional pengawasan masih sangat terbatas
 - c. Kurangnya kesadaran perangkat daerah/objek pemeriksaan dalam menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan baik hasil pemeriksaan intern maupun ekstern, terutama menyangkut pengembalian keuangan negara/daerah
3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah tidak terlalu signifikan.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan
 - a. Tantangan

Dengan bergulirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana penekanan otonomi daerah berada

pada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memberikan kewenangan yang jauh lebih besar, ini berarti Pemerintah Kota Jambi khususnya diberi kewenangan yang luas namun bertanggung jawab dalam mengatur rumah tangganya sendiri;

b. Peluang

Yang dimaksud dengan peluang dalam rencana strategis Inspektorat Kota Jambi adalah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi organisasi Inspektorat Kota Jambi. Dengan demikian peluang Inspektorat Kota Jambi dalam mencapai tujuannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1) Tuntutan masyarakat untuk melaksanakan reformasi di segala bidang.

Semangat reformasi membawa kepada tuntutan pemberdayagunaan aparatur pemerintah agar mampu mewujudkan administrasi negara yang baik dengan mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan dengan melaksanakan prinsip-prinsip good governance.

2) Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi global.

Aspek teknologi komunikasi dan informasi merupakan aspek yang dapat mendukung suatu proses kerja yang lebih baik dan berhasilguna. Perkembangan kemajuan teknologi dewasa ini sangat pesat dan tidak dapat dihindari, oleh karena itu merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk menyesuaikan dengan kemajuan teknologi tersebut. Walaupun saat ini Inspektorat Kota Jambi telah memiliki perangkat teknologi informasi yang cukup tetapi belum memadai, untuk itu dalam menghadapi dinamika tersebut di tahun-tahun yang akan datang hendaknya perlu peningkatan penggunaan peralatan-peralatan yang lebih mencukupi dalam menunjang proses kegiatan Inspektorat Kota Jambi.

5. Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti perumusan program/kegiatan prioritas untuk tahun depan adalah kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Internal yang transparan, akuntabel dan bebas KKN.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Review terhadap Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan sehubungan dengan perkembangan yang terjadi, terdapat perbedaan besaran pagu indikatif antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dikarenakan perhitungan ulang demi tercapainya target kinerja sesuai dengan Renstra. Perbandingan pagu indikatif antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 (Tabel T-C 31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kota Jambi

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Kota Jambi											
Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Jambi	-LEVEL KAPABILITAS APIP -NILAI AREA SISTEM MANAJEMEN SDM DAN PENGUATAN AKUNTABILITAS (HASIL PENILAIAN INSPEKTORAT)		11,210,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Jambi	-LEVEL KAPABILITAS APIP -NILAI AREA SISTEM MANAJEMEN SDM DAN PENGUATAN AKUNTABILITAS (HASIL PENILAIAN INSPEKTORAT)	-LEVEL 3 -3,45	14,542,552,925	
1						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Jambi	Nilai SAKIP PD (Hasil Penilaian Inspektorat)	84.50	7,492,500	
2						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Jambi	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	8,944,384,877	
3						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Jambi	Persentase Penyampaian Hasil Rekonsiliasi BMD Tepat Waktu	100%	14,400,000	
4						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Jambi	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	72.11	996,833,250	
5						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Jambi	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai RKBU	70%	1,228,650,968	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Jambi	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai RKBU	70%	2,154,774,930	
7						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Jambi	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	615,396,400	
8						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Jambi	Persentase Peningkatan BMD Dalam Kondisi Baik	5%	580,620,000	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kota Jambi	Rata-rata Nilai SAKIP PD (Komponen Evaluasi Internal)		1,228,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kota Jambi	Rata-rata Nilai SAKIP PD (Komponen Evaluasi Internal)	6.89	3,459,690,100	
1						Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Jambi	Persentase Penurunan Temuan Internal dan Eksternal yang Bermilai Uang	20%	3,159,690,100	
2						Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Jambi	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas)	100%	300,000,000	
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kota Jambi	Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi		1,127,000,000	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kota Jambi	Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	3	800,000,000	
1						Pendampingan dan Asistensi	Kota Jambi	Nilai Rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi PD (Hasil SA Inspektorat)	70	800,000,000	

2.5. Penelahaan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Inspektorat Kota Jambi berkedudukan sebagai pelaksana urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kota Jambi hanya membuat program dan kegiatan lingkup pembinaan dan pengawasan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sehingga usulan program dan kegiatan dari masyarakat secara langsung tidak ada. Akan tetapi, masyarakat dapat mengajukan laporan melalui pengaduan masyarakat atas indikasi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku untuk diadakan pemeriksaan tujuan tertentu/khusus.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 dengan visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**, sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024. Dokumen RPD Kota Jambi 2024-2026 berada pada periode tahapan Keempat dari RPJPD Kota Jambi 2005-2025, sehingga prioritas pembangunan jangka panjang tahap keempat (2020-2025) akan menjadi acuan dalam perumusan tujuan dan sasaran RPD 2024-2026. Pembangunan jangka panjang tahap keempat ditujukan untuk mewujudkan visi Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan Barang dan Jasa yang religius dan berbudaya pada tahun 2025. Pembangunan di berbagai bidang ditujukan untuk menjadikan Kota Jambi sebagai kota yang mandiri dengan struktur perekonomian yang mantap melalui sektor jasa sebagai pendorong perekonomian utama yang didukung dengan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas sebagai aktor pembangunan bukan hanya sebagai objek pembangunan.

Berdasarkan identifikasi terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005-2025, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2024-2026 adalah :

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
2. Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
3. Terwujudnya aksesibilitas dan kapabilitas utilitas perkotaan yang berkelanjutan.

4. Terjaganya pertumbuhan ekonomi.
5. Terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing.

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan ditetapkan sasaran-sasaran pembangunan:

1. Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK
2. Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah
3. Peningkatan toleransi masyarakat
4. Peningkatan pelayanan kebencanaan
5. Peningkatan kinerja layanan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dan Berketahanan Iklim
6. Peningkatan Realisasi Investasi
7. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
8. Peningkatan Ketahanan Pangan
9. Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja
10. Peningkatan Derajat Kesehatan
11. Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan
12. Penurunan prevalensi stunting
13. Mewujudkan Kota Ramah Anak
14. Peningkatan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan
15. Pengendalian angka Kelahiran Penduduk
16. Penurunan angka Kemiskinan
17. Penurunan angka PMKS

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran tujuan dan sasaran dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Jambi yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Inspektorat Kota Jambi mendukung tujuan ke-satu yaitu "Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik", dengan sasaran "Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK"

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Jambi

No.	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Target Tahun 2024	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target Tahun 2024
1	2			3	4	
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Berbasis TIK	Nilai SAKIP Nilai Maturitas SPIP	15,30 3.10

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari misi yang ingin dilaksanakan, dengan demikian tujuan tidak boleh lepas dari upaya pencapaian keberhasilan misi. Dengan merumuskan tujuan dimaksudkan agar upaya pencapaian misi lebih terarah dan terfokus, dalam merumuskan tujuan Inspektorat Kota Jambi yaitu ***"Mewujudkan Pengawasan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel"***. Pada umumnya tujuan-tujuan telah dirumuskan cukup jelas, selaras dengan misi, menggambarkan hasil yang akan dicapai, mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman organisasi, mengakomodasi isu strategis yang dihadapi serta mencerminkan dimana organisasi berperan. Hubungan antara tujuan Perangkat Daerah dengan sasaran Perangkat daerah dapat dilihat pada tabel 3.2 dan tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.2

Tujuan Inspektorat Kota Jambi

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Kinerja Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2024
1	Mewujudkan Pengawasan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Level Kapabilitas APIP	Level 3
		Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,10

Tabel 3.3
Sasaran Inspektorat Kota Jambi

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024
1	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Level Kapabilitas APIP	3
		Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah)	15,30

Disajikan pula mengenai Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Jambi pada tabel 3.4 dibawah ini.

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Jambi

No.	Indikator Kinerja Utama	Target Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024
1	Level Kapabilitas APIP	3
2	Nilai SAKIP (Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	15,30
3	Nilai Maturitas SPIP	3,10

BAB **IV**

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja (Renja) merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Penyusunan Perubahan Renja berpedoman pada Renstra Inspektorat Kota Jambi dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan Perubahan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebanyak 3 program, yang terdiri dari program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program penyelenggaraan pengawasan, dan program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi.
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebanyak 11 kegiatan dan 33 sub kegiatan.
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024 adalah sebesar Rp 15.203.729.000,- yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian :
 - a. Rp 12.348.941.280,- untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
 - b. Rp 2.323.433.720,- untuk program penyelenggaraan pengawasan.
 - c. Rp 531.354.000,- untuk program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi.

Adapun sasaran Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024 dan program/kegiatan/sub kegiatan utama pendukungnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Level Kapabilitas APIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota
		Nilai SAKIP (Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Program Penyelenggaraan Pengawasan
		Nilai Maturitas SPIP	Program Perumusan Kebijakan, pendampingan dan asistensi

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan pada Renja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 disertai indikatornya dan prakiraan maju tahun 2024 tersaji pada tabel 4.2 berikut.

No.	Kode	Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Outcome) Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target capaian	Kebutuhan dana	Sumber		Target	Kebutuhan dana
2	6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rata-rata Nilai SAKIP PD (Komponen Evaluasi Internal)		6,89	3,459,690,100			6,89	3,308,490,100
	6 01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penurunan Temuan Internal dan Eksternal yang Bermilai Uang	Inspektorat Kota Jambi	20%	3,159,690,100	APBD Kota Jambi		20%	3,008,490,100
	6 01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat Kota Jambi	19 laporan	350,000,000	APBD Kota Jambi		19 laporan	333,800,000
	6 01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat Kota Jambi	199 laporan	2,000,000,000	APBD Kota Jambi		199 laporan	2,000,000,000
	6 01 02 2.01 03	Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	Inspektorat Kota Jambi	40 laporan	150,000,000	APBD Kota Jambi		40 laporan	150,000,000
	6 01 02 2.01 04	Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	Inspektorat Kota Jambi	40 laporan	150,000,000	APBD Kota Jambi		40 laporan	15,000,000
	6 01 02 2.01 06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Inspektorat Kota Jambi	1 Kesepakatan	209,690,100	APBD Kota Jambi		1 Kesepakatan	209,690,100
	6 01 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Inspektorat Kota Jambi	48 dokumen	300,000,000	APBD Kota Jambi		48 dokumen	300,000,000
	6 01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas)	Inspektorat Kota Jambi	100%	300,000,000	APBD Kota Jambi		100%	300,000,000
	6 01 02 2.02 02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Kota Jambi	14 laporan	300,000,000	APBD Kota Jambi		14 laporan	300,000,000
3	6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBUJUKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Matritisasi SPSP Kota Jambi		3	800,000,000			3	800,000,000
	6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi	Nilai Rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi PD (Hasil SA Inspektorat)	Inspektorat Kota Jambi	70	800,000,000	APBD Kota Jambi		70	800,000,000
	6 01 03 2.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Kota Jambi	40 PD	300,000,000	APBD Kota Jambi		40 PD	300,000,000
	6 01 03 2.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Jambi	40 PD	300,000,000	APBD Kota Jambi		40 PD	300,000,000
	6 01 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat Kota Jambi	5 kegiatan	150,000,000	APBD Kota Jambi		5 kegiatan	150,000,000
	6 01 03 2.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengawasan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengawasan Integritas	Inspektorat Kota Jambi	40 PD	50,000,000	APBD Kota Jambi		40 PD	50,000,000
						19,802,243,025				17,125,174,095

No.	Kode	Usaha/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target capaian	Kebutuhan dana	Sumber		Target	Kebutuhan dana
6 01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektoral Kota Jambi	70%	1,228,650,968	APBD Kota Jambi		70%	1,225,650,968
6 01	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Inspektoral Kota Jambi	9 paket	20,828,520	APBD Kota Jambi		9 paket	20,828,520
6 01	01	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Inspektoral Kota Jambi	3 paket	181,512,225	APBD Kota Jambi		3 paket	181,512,225
6 01	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Inspektoral Kota Jambi	3 paket	44,128,353	APBD Kota Jambi		3 paket	44,128,353
6 01	01	2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Inspektoral Kota Jambi	2 paket	81,437,370	APBD Kota Jambi		2 paket	81,437,370
6 01	01	2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Inspektoral Kota Jambi	12 laporan	184,815,000	APBD Kota Jambi		12 laporan	184,815,000
6 01	01	2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Inspektoral Kota Jambi	12 laporan	715,929,500	APBD Kota Jambi		12 laporan	715,929,500
6 01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektoral Kota Jambi	70%	2,154,774,930	APBD Kota Jambi		70%	208,000,000
6 01	01	2.07	Pengadaan Mebel	Inspektoral Kota Jambi	154 unit	284,535,200	APBD Kota Jambi		154 unit	100,000,000
6 01	01	2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektoral Kota Jambi	107 unit	1,880,239,730	APBD Kota Jambi			
6 01	01	2.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektoral Kota Jambi	1 unit	-	APBD Kota Jambi		1 unit	100,000,000
6 01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektoral Kota Jambi	100%	615,398,400	APBD Kota Jambi		100%	615,398,400
6 01	01	2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektoral Kota Jambi	400 laporan	6,900,000	APBD Kota Jambi		400 laporan	6,900,000
6 01	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Inspektoral Kota Jambi	36 laporan	158,200,000	APBD Kota Jambi		36 laporan	158,200,000
6 01	01	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Inspektoral Kota Jambi	60 laporan	450,298,400	APBD Kota Jambi		60 laporan	450,298,400
6 01	01	2.09	Penelitian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektoral Kota Jambi	5%	580,620,000	APBD Kota Jambi		5%	580,620,000
6 01	01	2.09	Penelitian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan, Biaya Penelitian, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektoral Kota Jambi	29 unit	337,050,000	APBD Kota Jambi		29 unit	337,050,000
6 01	01	2.09	Penelitian Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Inspektoral Kota Jambi	83 unit	45,350,000	APBD Kota Jambi		83 unit	45,350,000
6 01	01	2.09	Penelitian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan, Biaya Penelitian, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektoral Kota Jambi	1 unit	198,220,000	APBD Kota Jambi		1 unit	198,220,000

Tabel 4.2 (T-C.33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Inspektorat Kota Jambi

No.	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target capaian	Kebutuhan dana	Sumber		Target	Kebutuhan dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	6 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-LEVEL KAPABILITAS AP-IP -NILAI AREA SISTEM MANAJEMEN SDM DAN AKUNTABILITAS (HASIL PENILAIAN INSPEKTORAT)	Inspektorat Kota Jambi	-LEVEL 3 -3,45	14,542,552,925	APBD Kota Jambi		-LEVEL 3 -3,45	13,016,683,995
6 01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD (Hasil Penilaian Inspektorat)	Inspektorat Kota Jambi	84.50	7,492,500	APBD Kota Jambi		84.50	7,492,500
6 01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Kota Jambi	2 dokumen	4,495,500	APBD Kota Jambi		2 dokumen	4,495,500
6 01	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Kota Jambi	1 laporan	2,997,000	APBD Kota Jambi		1 laporan	2,997,000
6 01	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	Inspektorat Kota Jambi	100%	8,944,384,877	APBD Kota Jambi		100%	9,439,560,877
6 01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Kota Jambi	65 orang/bulan	8,768,824,877	APBD Kota Jambi		65 orang/bulan	9,268,824,877
6 01	01	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pendatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Inspektorat Kota Jambi	12 dokumen	175,560,000	APBD Kota Jambi		12 dokumen	170,736,000
6 01	01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Hasil Rekonsiliasi BMD Tepat Waktu	Inspektorat Kota Jambi	100%	14,400,000	APBD Kota Jambi		100%	14,400,000
6 01	01	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Inspektorat Kota Jambi	12 laporan	14,400,000	APBD Kota Jambi		12 laporan	14,400,000
6 01	01	Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Inspektorat Kota Jambi	72.11	996,833,250	APBD Kota Jambi		72.11	933,563,250
6 01	01	Pengadaan Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakai Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Inspektorat Kota Jambi	163 paket	135,697,500	APBD Kota Jambi		163 paket	72,427,500
6 01	01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Inspektorat Kota Jambi	64 orang	649,200,000	APBD Kota Jambi		64 orang	649,200,000
6 01	01	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Kota Jambi	64 orang	211,935,750	APBD Kota Jambi		64 orang	211,935,750

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Inspektorat Kota Jambi di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengawasan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024 pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Jambi;
2. Penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Kota ini berpedoman pada Renstra Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024-2026;
3. Penyusunan Perubahan Renja Inspektorat ini juga berpedoman pada RKPD Kota Jambi Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Inspektorat ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RKAP nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Jambi. Begitu pula dalam penyusunan DPAP dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Jambi;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024 untuk setiap triwulannya;

Selanjutnya program dan kegiatan pada Perubahan Renja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Inspektorat Kota Jambi, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif perangkat daerah lainnya dan *stakeholder* terkait.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Jambi pada Tahun Anggaran 2024.

INSPEKTUR,



DESYANTY, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19791208 199810 2 001

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KASUBBAG PERENCANAAN	SEKRETARIS
Tgl. 	Tgl. 
RICKY EKASARI, S.STP, M.Si NIP. 19920331 201206 2 001	Hj. TIN SUHARTINI, SE NIP. 19680622 199601 2 001

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024 untuk setiap triwulannya;

Selanjutnya program dan kegiatan pada Perubahan Renja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Inspektorat Kota Jambi, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif perangkat daerah lainnya dan *stakeholder* terkait.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Jambi pada Tahun Anggaran 2024.

INSPEKTUR,



DESYANTY, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19791208 199810 2 001